

NASKAH PUBLIKASI

**PERAN PEMERINTAH DESA DALAM Mendukung PERPUSDES
UNTUK MENINGKATKAN LITERASI DI DESA WUKIRSARI IMOGIRI
KABUPATEN BANTUL**

Oleh:
AJENG FITRI LESTARI
20150520071

Telah disetujui dan disahkan sebagai naskah publikasi sesuai kaidah
penulisan karya ilmiah

Dosen Pembimbing



Isnaini Muallidin, S.IP., M.A.
NIK: 19710225201204 163 130

Mengetahui,



**Dekan Fakultas Ilmu Sosial
dan Ilmu Politik**

Dr. Tifin Purwaningsih, S.IP., M.Si
NIK: 19690822199603 163 038



**Ketua Program Studi
Ilmu Pemerintahan**

Dr. Muchamad Zaenuri, M.Si
NIK: 19660828199403 163 025

PERAN PEMERINTAH DESA DALAM MENDUKUNG PERPUSDES UNTUK MENINGKATKAN LITERASI DI DESA WUKIRSARI IMOGIRI KABUPATEN BANTUL

Ajeng Fitri Lestari

Program Studi Ilmu Pemerintahan Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu
Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Email : ajeng.fitri.2015@fisipol.umy.ac.id

ABSTRAK

Pemerintah Kabupaten Bantul Tahun 2017 menciptakan program Gerakan Literasi Bantul yang bertujuan menumbuhkan minat baca masyarakat serta bertujuan mengaktifkan kembali Perpustakaan Desa di seluruh Kabupaten Bantul. Pada Tahun 2018 Pustaka Desa Wukirsari Imogiri mewakili Kabupaten Bantul dalam lomba Perpustakaan tingkat nasional mendapatkan juara ketiga perpustakaan terbaik di Indonesia. Keberhasilan Pustaka Desa adalah bagian penting dari Peran Pemerintah Desa Wukirsari dalam pengembangan dan pengelolaan yang berhasil bertahan sampai sekarang dan dapat dimanfaatkan oleh masyarakat. Dalam bidang kegiatan Pustaka Desa salah satunya mendorong perdes khusus yang mengatur tentang Pustaka Desa namun nyatanya belum ada peraturan komprehensif yang masuk ke dalam RPJMDes, maka dari itu penulis melihat bagaimana peran pemerintah dan bentuk koordinasi yang terjalin dalam pengembangan Perpustakaan Desa.

Dalam penelitian ini, analisis dan pengumpulan data menggunakan metode deskriptif kualitatif melalui wawancara langsung, dan data yang didapatkan dilapangan adalah data primer dan data sekunder. Penelitian ini menggunakan Teori Peran dari peneliti sebelumnya Horoepoetri, Arimbi dan Santoso (2003) yang mempunyai variabel diantaranya adalah peran sebagai suatu kebijakan, peran sebagai strategi, dan peran sebagai alat komunikasi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Peran ini diperkuat oleh tiga variabel diantaranya peran sebagai suatu kebijakan, peran sebagai strategi dan peran sebagai komunikasi. Peran yang dilakukan dalam pengembangan Perpustakaan Desa sudah cukup optimal mulai dari terbentuknya Alokasi Dana khusus untuk pengelolaan Perpustakaan, memberikan sosialisasi kepada masyarakat untuk selalu memanfaatkan Perpustakaan Desa, dan mengembangkan pojok-pojok baca di setiap Dusun.

Kata Kunci : Peran Pemerintah, Literasi Minat Baca, Perpustakaan Desa.

A. PENDAHULUAN

Tahun 2016 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menggiatkan Gerakan Literasi Nasional (GLN) sebagai bagian dari implementasi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2015 tentang Penumbuhan Budi Pekerti. Upaya yang dilakukan pemerintah dalam program Gerakan Literasi Nasional ini melalui sosialisasi, kegiatan literasi, organisasi dimasyarakat dan lembaga lain. Kegiatan gerakan literasi ini dilaksanakan melalui beberapa cara, diantaranya membangun Taman Bacaan Masyarakat, pojok baca, perpustakaan keliling, dan atau Perpustakaan Desa.

Gerakan Literasi Masyarakat (GLS) melalui Perpustades ini merupakan aspek penting dalam program pembangunan desa dan telah menjadi prioritas sasaran dari program literasi karena rendahnya literasi berada di luar sekolah yakni dilingkungan masyarakat yang memang pendidikannya masih rendah.). Perpustakaan Desa melalui Kepmendagri dan Otonomi Daerah Nomor 3 Tahun 2001 dalam pasal 1 dan 2 tentang perpustakaan menyatakan bahwa “desa/kelurahan yaitu sebagai salah satu penyedia dan sumber bacaan belajar bagi masyarakat dalam rangka memberdayakan masyarakat serta sebagai penunjang pelaksanaan pendidikan nasional.”

Menurut Duta Baca Perpustakaan Nasional RI Tingkat minat baca Negara Indonesia masih tergolong rendah, dan bahkan Negara Indonesia mendapat peringkat ke 60 dari 61 negara yang disurvei. Survei tersebut berasal dari *Central Connecticut State University* yang dilakukan pada Maret 2016. Hasil survei tersebut tidak jauh berbeda dari Badan Pusat Statistik (BPS) Indonesia yang dimana tinggi minat baca masyarakat Indonesia hanya 0.01 persen pertahun. Di Kota Yogyakarta indeks minat baca masyarakat juga masih rendah dibandingkan dengan kota-kota maju lainnya. Berdasarkan indeks baca nasional, minat baca Kota DIY pada tahun 2015 hanya sebesar 0.18 dan indeks nasional sebesar 0,01. Sedangkan, rata-rata indeks di Negara Indonesia antara 0.45-0.62.

Sedangkan berdasarkan UNESCO pada tahun yang sama minat baca masyarakat Indonesia hanya 0.001 artinya dari 1000 orang hanya 1 orang yang mau membaca. Menurut Wibowo yang bekerja dibadan BPAD DIY mengatakan rata-rata masyarakat sekarang lebih suka menonton, dan mendengarkan daripada membaca, hal tersebut yang menunjukkan minat baca di Indonesia terbilang rendah. (Nurul & Yoyon, 2015)

Tahun 2017 Pemerintah Kabupaten Bantul dalam upaya untuk meningkatkan minat baca di Kabupaten Bantul menciptakan program Gerakan Literasi Bantul yang bertujuan menumbuhkan minat baca masyarakat di Desa, Pemerintah Kabupaten Bantul mengaktifkan kembali perpustakaan desa. Pemerintah desa juga diminta menganggarkan 5% dari APBD Desa untuk pengelolaan Perpustakaan Desa. Selain itu Desa juga di berikan kewenangan membentuk dan mengelola perpustades dengan menggunakan anggaran dari Alokasi Dana Desa (ADD). Regulasi tersebut diperkuat dalam instruksi Bupati Nomor 03 Tahun 2017 tentang gerakan literasi yang sesuai dengan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Bantul “Makarya Mbangun Desa” untuk mewujudkan Bantul Cerdas program tersebut semakin menguatkan penganggaran bagi perpustakaan di Desa.

Dalam meningkatkan pengelolaan dan mengaktifkan gerakan literasi ini berjalan dengan semestinya Dispupip Kabupaten Bantul rutin menggelar perlombaan Perpustades. Tahun 2018, Perpustades Wukirsari mewakili Bantul dalam lomba perpustakaan tingkat nasional. Pustaka Desa Wukirsari berdiri sejak tahun 2012, keberadaan fasilitas perpustades ini tidak hanya sekedar menjadi kampanye budaya membaca namun juga sebagai pemberdayaan masyarakat di Desa Wukirsari. Masalah yang di dapat dari penelitian ini adalah Peran Pemerintah Desa di rasa belum optimal hal ini dibuktikan dengan belum tercantumnya secara lengkap dan komitmen politis di Pemerintah Desa Wukirsari dalam memperkuat perdes yang mengatur tentang Perpustades di RPJMDes yang dimana dalam

RPJMDes Tahun 2016-2022 tidak disebutkan adanya peraturan khusus tentang perpustades yang dimana Pustaka Desa Wukirsari tersebut sebagai salah satu nilai unggul yang ada di Desa Wukirsari. Peran Pemerintah Desa sangat dibutuhkan dalam pengembangan program daripada gerakan literasi yang ada di masyarakat desa dalam menumbuhkan minat baca dan meningkatkan literasi masyarakat di Desa Wukirsari ini melalui Perpustades.

B. METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini jenis metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif deskriptif. Menurut Sugiyono (2014:1) metode penelitian kualitatif adalah suatu metode penelitian yang digunakan dalam meneliti kondisi suatu obyek yang ilmiah dimana peneliti sendiri sebagai kunci, teknik pengumpulan data yang dilakukan secara triangulasi, analisis data dan hasil penelitian. Dalam penelitian ini penulis akan mendeskripsikan bagaimana Peran Pemerintah Desa dalam mendukung Perpustades untuk meningkatkan literasi di masyarakat Desa dan mengambil studi kasus di Desa Wukirsari Imogiri Kabupaten Bantul. Dalam mendukung kevalidan data dari penelitian ini penulis menggunakan data primer dan data sekunder. Sedangkan, teknik pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi. Data yang didapat secara langsung seperti melalui proses wawancara dengan pihak-pihak yang terkait di penelitian ini. Analisis data adalah proses pengumpulan dan mengurutkan data sesuai dengan kategori, pola dan kesimpulan dari uraian yang telah dipaparkan oleh penulis, sehingga dapat dirumuskan analisa yang kuat sesuai dengan data. . Dalam menyusun penelitian ini menjadi lengkap beserta dengan data yang valid, proses analisa melalui penyajian data, reduksi data, dan kesimpulan.

C. PEMBAHASAN

Desa Wukirsari yang berada di Kecamatan Imogiri di Kabupaten Bantul Yogyakarta mempunyai salah satu fasilitas unggulan dalam pendidikan yaitu Perpustakaan Desa, Pustaka Desa Wukirsari. Pustaka Desa Wukirsari menjadi Perpustakaan Unggulan berhasil menjadi perwakilan Kabupaten Bantul dalam ajang Perpustakaan terbaik yang diikuti oleh perpustakaan-perpustakaan dari seluruh Indonesia.

Pustaka Desa Wukirsari mendapatkan Juara ketiga secara nasional, acara tersebut diselenggarakan oleh Perpustakaan RI. Tujuan ini tidak hanya sebagai kampanye perpustakaan terbaik saja tetapi tujuan yang penting adalah sebagai strategi dalam meningkatkan literasi dan menumbuhkan minat baca masyarakat yang rendah. Pemerintah menggagas program ini untuk menurunkan angka buta aksara di Indonesia dan sebagai sosialisasi pentingnya program perpustakaan desa di masyarakat.

1. Peran Sebagai Suatu Kebijakan

a. Kebijakan yang Tepat dan Baik Dilaksanakan

Secara umum peranan pemerintah mempunyai peran dalam melaksanakan kebijakan serta pengawasan dalam pelaksanaan peraturan, tetapi juga dalam perumusan dan penentuan kebijakan-kebijaksanaan pemerintah karena fungsi pemerintah adalah fungsi politik. Kebijakan Pemerintah dalam membuat keputusan dilakukan dengan bersifat strategis, *policy*, atau ketentuan-ketentuan yang sesuai dengan isi perundang-undangan yang berlaku.

Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) Tahun 2016-2022 Desa Wukirsari yang berguna untuk menumbuhkan partisipasi aktif masyarakat dalam setiap proses pembangunan di desa, belum ada bentuk peraturan tertulis yang menyangkut tentang Peraturan khusus tentang Perpustakaan tersebut

namun Pemerintah Desa Wukirsari telah mengeluarkan peraturan tersebut dalam Surat Keputusan Lurah Desa Wukirsari Nomor 11 & 12 Tahun 2013 tentang Pembentukan dan Pengelolaan Perpustakaan Desa.

Terbentuknya Surat Keputusan Lurah Desa Wukirsari Nomor 11-12 Tahun 2013 tersebut diperkuat oleh Surat Keputusan Bupati Bantul, nomor 223 Tahun 2018 tentang Pendirian Perpustakaan Desa Wukirsari. Surat Keputusan ini membuktikan komitmen Bupati Bantul dalam memperkuat kedudukan Perpustakaan Desa dan sesuai dengan salah satu misinya yaitu menciptakan Gerakan Literasi Bantul dan regulasi tersebut diperkuat dalam instruksi Bupati Nomor 03 Tahun 2017 dalam menumbuhkan minat baca masyarakat di desa dan mengaktifkan kembali Perpustakaan Desa. dengan adanya Surat Keputusan Lurah Desa Wukirsari tentang pengelolaan dan pengembangan Perpustakaan Desa Wukirsari memiliki otoritas dalam pembuatan regulasi serta peraturan yang jelas dalam membuat keputusan. Dari wawancara bersama dengan Bapak Ujang Purnomo selaku Ketua Pengurus Pustaka Desa Wukirsari memberikan pernyataan sebagai berikut :

“Perpusdes Desa Wukirsari memang belum memiliki perdes khusus tetapi Pemerintah Desa Wukirsari sudah membentuk dalam SK Lurah Desa Wukirsari Nomor 11 & 12 Tahun 2013 dalam pembentukan dan pengelolaan Pustaka Desa jadi Pustraka Desa Wukirsari berpedoman pada SK tersebut, tetapi kita masih terus mendorong Pemerintah Desa untuk membuatkan perdes khusus dan masuk dalam RPJMDes.”

Pemerintah Desa Wukirsari hingga Tahun 2019 belum mampu mewujudkan dalam pembentukan perdes khusus tentang Pustakan Desa, namun Pustaka Desa dalam menjalankan fungsi pengelolaan Pustaka Desa sudah berpedoman dalam peraturan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Wukirsari berbentuk Surat Keputusan Lurah Nomor 11-12 Tahun 2013. Dari Surat Keputusan Lurah ini menjadi dasar

hukum yang dimaksudkan untuk menyediakan acuan tentang organisasi dan penyelenggaraan, koleksi buku, administrasi, kegiatan dan layanan, serta sarana dan prasarana yang berlaku pada Perpustakaan Desa.

b. Implementasi Pelaksanaan Yang Baik

Kebijakan dalam SK lurah Nomor 11 & 12 mengarah kepada salah satu Program Kegiatan Pustaka Desa Wukirsari dalam Studi dan Advokasi Pustaka Desa yang dimana sasaran program dari Perpustades ini ditujukan kepada Pemerintah Desa. Tujuan dari program ini untuk membuktikan sejauh mana peran Pemerintah Desa Wukirsari dalam memperkuat komitmennya pada Perpustakaan Desa sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

Perpustakaan Desa menghasilkan salah satu program Studi dan Advokasi Kebijakan Pustaka Desa tetapi dari hasil kebijakan tidak terlalu dijelaskan bagaimana koordinasi atau aturan yang mengikat secara hukum. Berjalannya koordinasi antar Pemerintah Desa dan Pengurus Pustaka Desa sudah sesuai dengan tanggung jawab masing-masing. Dari implementasi program studi dan advokasi kebijakan pustaka desa dilaksanakan telah berhasil menciptakan beberapa kegiatan pemberdayaan masyarakat dan literasi budaya. Salah satu kegiatan unggulan tersebut adalah MOU (*Memorandum of Understanding*) kegiatan MOU ini adalah bentuk-bentuk kerjasama antara Pustaka Desa dan paguyuban masyarakat di Desa Wukirsari dan organisasi masyarakat serta masyarakat Desa Wukirsari yang mempunyai surat aturan kerjasama yang jelas dan resmi yang dibentuk oleh Pustaka Desa Wukirsari

Implementasi dari program MOU (*Memorandum of Understanding*) masih berjalan sampai sekarang diantaranya adalah kegiatan Kalen Edukasi Lapatmo, Kalen Edukasi Tnasah Bejo dan Mbahe Kopi. Kegiatan ditempat tersebut mempunyai spot untuk pojok

baca yang dimana Pustaka Desa menyediakan peminjaman buku 50-100 buku untuk pojok-pojok baca dan di *rolling* setiap 1-2 bulan sekali selain itu Pustaka Desa melakukan pendampingan kegiatan Kelen Edukasi , Klinik Desain Pustaka Desa, dan Mbahe Kopi dimana kegiatan ini berbentuk pendampingan kegiatan Branding Logo dan Media Promosi. Kegiatan lain dari MOU (*Memorandum of Understanding*) berkaitan dengan peran pemuda Desa Wukirsari yaitu Pustaka Desa Wukirsari dengan Karang Taruna Budi Luhur Wukirsari kegiatan yang dilakukan lebih berfokus pada penyelenggaraan Kegiatan Literasi Budaya Wukirsari dan Penguatan Kelembagaan masing-masing pihak. Berdasarkan keterlibatan Karang Taruna hal tersebut sesuai dengan wawancara bersama dengan Hendry Anggara selaku Ketua Karang Taruna Budi Luhur Desa Wukirsari :

“kegiatan yang kami lakukan untuk Pustaka Desa setiap ada kegiatan masyarakat Karang Taruna ikut membantu langsung, sedangkan dalam penguatan literasi kita terjun langsung untuk menyadarkan masyarakat dalam pemanfaatan perpustakaan desa dan pojok-pojok baca karena kita tau pada era ini segala bentuk bacaan sudah semakin terkikis dengan kemajuan teknologi jadi ya Karang Taruna selalu membantu dan bekerja sama dengan segala kegiatan dan program yang dilakukan oleh Pustaka Desa.”

Karang Taruna Budi Luhur Wukirsari menjelaskan keterlibatan kerjasama yang baik dengan Pustaka Desa Wukirsari dan koordinasi antara kedua pihak biasanya melakukan forum dan pertemuan dalam rapat tetapi tidak dijelaskan kapan saja waktu pelaksanaannya, pertemuan koordinasi tersebut membahas pengembangan pojok-pojok baca dan kegiatan edukasi lainnya yang sudah berjalan dan dari pertemuan tersebut membahas pelaksanaan masing-masing aktor dan membagi tugas bersama walaupun masih ada beberapa pihak atau salah satu *stake holders* yang kurang berpartisipasi.

2. Peran Sebagai Strategi

a. Dukungan Masyarakat

Keberhasilan dari Pustaka Desa Wukirsari sebagai Perpustades unggulan yang di miliki oleh Desa Wukirsari adalah berbicara tentang strategi selain dari masyarakatnya yang antusias dengan adanya Perpustades, dan pengurus Pustaka Desa Wukirsari yang mempunyai komitmen penuh dalam pengelolaan Perpustades dan *stake holders* yang menjadi mitra dalam mendukung Pustaka Desa Wukirsari, dalam Pengelolaan dan pengembangan tidak terlepas dari Peran Pemerintah Desa Wukirsari yang turut andil dalam memutuskan dan sebagai lembaga pemerintah utama yang mempunyai fungsi mengatur segala program dan pelayanan publik yang ada di Desa.

Dukungan masyarakat yang berperan aktif dalam segala bentuk kegiatan di Pustaka Desa Wukirsari membuktikan bahwa kegiatan ini berhasil menarik partisipasi masyarakat desa dalam memberikan dukungan yang positif dengan adanya perpustakaan desa ini. Selain Perpustakaan Desa program unggul lainnya dalam menumbuhkan mina jika dilihat, sejauh mana dukungan peran pemerintah desa dalam mendukung perpustades Bapak Ujang selaku ketua pengurus pustaka desa menegaskan berkaitan dengan perdes khusus tentang pustaka desa bahwa aslinya perdes tersebut seharusnya masuk di RPJMDes. Wawancara dengan Bapak Ujang selaku Ketua Pustaka Desa Wukirsari yang memberikan pernyataan bahwa:

“sejak berdirinya Pusta Desa ini kita dari pengurus juga maunya ada perdes khusus yang mengatur tentang perpustakaan desa, tetapi memang belum ada. Tetapi kaitannya dengan pendanaan pustaka desa wukirsari sudah masuk di APBDes Wukirsari.”

Dalam wawancara tersebut menjelaskan, perdes khusus yang mengatur tentang Pustaka Desa Wukirsari memang belum masuk ke dalam RPJMDes Desa tetapi dari pengurus pustaka desa sendiri menjelaskan selain pengelolaan dana untuk pustaka desa dibentuk oleh Pemerintah Desa, dari pengurus pustaka desa sendiri mengikuti SK Lurah nomor 12-13 yang mengatur tentang pengembangan dan

pengelolaan perpustakaan desa. Selain peraturan tersebut sudah tertulis di dalam SK Lurah nomor 11-12 peran dari Pemerintah Desa untuk pustaka desa bersifat dominan, dimulai tahun 2014 Pemerintah Desa mulai mempercayakan Pustaka Desa untuk mandiri, mitra pertama dari pustaka desa dibantu oleh Medco Foundation.

b. Kredibilitas dalam Mengambil Keputusan

Upaya pengembangan Pustaka Desa bukanlah suatu usaha yang langsung jadi tetapi melalui proses yang panjang yang melibatkan pikiran yang inovatif, kreatif serta mengatur strategi yang matang. Untuk mencapai strategi tersebut tercapai Lurah Desa dan Pemerintah Desa Wukirsari sebagai tokoh pengambil keputusan dalam upaya pengembangan Pustaka Desa ini tetap berjalan sampai sekarang. Berikut bentuk-bentuk upaya yang dilakukan Lurah Desa Wukirsari untuk pengembangan Perpustades meliputi :

- 1) Mensosialisasikan kepada warga desa tentang manfaat dan jasa dengan adanya Perpustakaan Desa
- 2) Mendekatkan buku dan membudidayakan minat baca kepada warga Desa Wukirsari dan sekitarnya
- 3) Menyediakan Perpustakaan sebagai pusat informasi, komunikasi dan Ilmu Pengetahuan
- 4) Menyediakan tempat Perpustakaan Desa yang nyaman dengan menyediakan kegiatan-kegiatan hiburan yang sehat dan mendidik
- 5) Selalu berusaha kooperatif dan komunikatif dengan Pengurus Pustaka Desa dan *stake holders* mengenai segala kebutuhan Perpustakaan desa.

Pemerintah desa sendiri dalam melakukan pertemuan-pertemuan antara lembaga desa, dari elemen masyarakat Desa Wukirsari turut diikutsertakan, Selain itu dari Lurah Desa sendiri selalu mensosialisasikan kepada masyarakat bahwa setiap pertemuan atau musyawarah yang berkaitan dengan kegiatan dimasyarakat

dilaksanakan saja dilingkungan Perpustakaan Desa dengan begitu masyarakat merasa dekat dengan perpustakaan dan buku bacaan.

Peran dalam perannya untuk pengembangan Perpustakaan Desa adalah selalu mengawasi Alokasi Dana Desa bagi pengembangan dan pengelolaan Perpustakaan yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Wukirsari. Dari wawancara bersama Bapak Sutrisno Ketua BPD Pemerintah Desa Wukirsari sebagai berikut :

“memang benar, Pustaka Desa sudah masuk dalam alokasi dana dana itu digunakan untuk segala kebutuhan pengelolaan yang ada di perpustakaan termasuk memberikan daa honorum bagi semua pengurus perpustakaan disini fungsi BPD adalah mengawasi dan selalu berusaha menciptakan transparansi agar masyarakat tahu bahwa ada dana untuk perpustakaan sebesar ini, ya begitu.”

BPD mempunyai peran strategis dalam hal pengawasan sumber dana. tetapi dalam pembuatan perdes khusus BPD belum mampu mewujudkan dalam program studi dan advokasi Pustaka Desa hal ini disebabkan karena pergantian Lurah di Desa Wukirsari sehingga Desa melakukan evaluasi dalam pembuatan RPJMDes dan lebih fokus dalam merubah perdes-perdes yang menjadi prioritas.

Penganggaran secara rutin baru dilakukan mulai awal berdiri tahun 2013, namun alokasi anggaran untuk perpustakaan tidak tetap. Besarnya anggaran tersebut adalah Rp. 3.000.000,- (Tahun 2013-2014) dan Sekitar Rp. 17.000.000,- (Tahun 2015-2018) dari ADD (Alokasi Dana Desa) untuk perpustakaan yang dialokasikan untuk pengembangan koleksi 30%, penyelenggaraan jasa/layanan perpustakaan 50%, dan pengeluaran lainnya 20%. Sumber anggaran lainnya hasil kerjasama dengan Medco Foundation, BPAD DIY dan hasil usaha mandiri. dana sebesar ini tidak hanya untuk program berbentuk fisik saja tetapi digunakan dan dimanfaatkan juga untuk membangun Pustaka Desa Lengkap dengan operasionalnya.

Upaya yang dilakukan oleh Ketua Pengurus Pustaka Desa Wukirsari dalam mengembangkan Pustaka Desa agar tetap berkembang menjadi lebih baik meliputi :

- 1) Menyusun konsep perencanaan baik program atau kegiatan yang bersifat inovatif dan kreatif.
- 2) Mengembangkan program MOU (*Memorandum of Understanding*) agar tetap berjalan.
- 3) Bertanggung jawab mengelola administrasi perpustakaan.
- 4) Melakukan *stock opname* secara berkala terhadap koleksi buku di Pustaka Desa dan pojok-pojok baca di setiap dusun di Desa Wukirsari.
- 5) Pemanfaatan Sosial Media dan ikut menyebarkan konten-konten positif.

Tokoh pengambilan keputusan ada tiga peran pokok yang berjalan yaitu Pemerintah Desa, BPD dan Ketua Pengurus Pustaka Desa. Ketiga peran tersebut mempunyai kebijakan dan kewenangan masing-masing dalam kredibilitas peran tersebut untuk mengatur dan mengembangkan Perpustakaan Desa namun tetap pada satu tujuan yaitu Perencanaan yang matang dan pelibatan penyusunan program pembangunan akan menghasilkan keputusan yang tepat bagi kemajuan di Desa sehingga perencanaan program Pembangunan Desa akan tercapai sesuai dengan tujuan yang direncanakan.

3. Peran Sebagai Alat Komunikasi

a. Transparansi Pemerintah Kepada Masyarakat

Salah satu bidang kegiatan dari rencana kegiatan tersebut adalah mendorong terbitnya Peraturan Desa (Perdes) tentang Pustaka Desa Wukirsari. Kegiatan ini juga bertujuan mendorong komitmen politis antara Pemerintah Desa Wukirsari dengan pengelolaan dan pengembangan Perpustakaan Desa, karena SK Lurah nomor 13-14 yang dimiliki Pustaa Desa saja belum terlalu kuat dalam mengatur kebijakan yang sudah masuk ke dalam APBDes Wukirsari. Komitmen pelayanan kepada masyarakat yang dibangun Pemerintah Desa

Wukirsari untuk Perpustakaan Desa ini apakah sudah sejalan dengan keinginan masyarakatnya dengan ini pernyataan dari Bapak Ujang Purnomo selaku Ketua Pustaka Desa Wukirsari sebagai berikut:

“dalam penyusunan perdes yang menginisiasi harusnya dari pihak BPD, nah sebenarnya urusan dengan penyusunan perdes itu kan ranah kerjanya mereka nah kebetulan banyak perdes yang harus dilahirkan oleh BPD dan Pemerintah Desa yang lebih wajib dan itu juga belum selesai dan dalam 5 tahun ini mereka belum selesai dalam menyelesaikan perdes yang wajib-wajib tersebut. Jadi, perdes yang untuk pustaka desa ini masih belum terlaksana tetapi suatu saat pasti terbentuk segera.”

Dari wawancara tersebut dapat terlihat komunikasi dan koordinasi Pemerintah Desa dengan Pengurus Perpustakaan Desa kurang optimal dalam penyusunan Perdes khusus untuk perpustakaan tetapi permasalahan tersebut terimbangi dengan komitmen Pemerintah Desa Wukirsari yang telah menyusun APBDes untuk pengelolaan Perpustakaan Desa. Di dalam struktur pemerintahan terutama BPD pasti mempunyai seksi-seksi dan perwakilan di setiap dusun, seharusnya masalah tersebut dapat teratasi dengan adanya komunikasi dan koordinasi yang baik jika perdes tersebut ingin dapat segera terlaksana tetapi kembali lagi bahwa tugas dan kewenangan di setiap Desa juga berbeda.

Guna mengatasi masalah yang ada di Desa melalui Ketua BPD Bapak Sutrisno membuka program *Public-Hearing* yang dikhususkan kepada warga Desa Wukirsari dalam menyampaikan keluhan atau ingin berkonsultasi tentang masalah yang berkaitan tentang desa, *Public-Hearing* ini bertujuan mendekatkan warga masyarakat dengan Pemerintah Desa bahwa Pemerintah Desa ingin menunjukkan peayanan yang baik bagi warga masyarakat Desa Wukirsari, dalam menumbuhkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa sehingga dituntut kemampuannya untuk dapat menggali berbagai persoalan, keinginan dan harapan masyarakat, sebab partisipasi aktif

masyarakat sangat penting untuk dapat mengimplementasikan berbagai rencana program sehingga tujuan dari Pembangunan Desa dapat terwujud.

b. Pelayanan Kepada Masyarakat

Upaya Pemerintah Desa Wukirsari dalam mewujudkan Pustaka Desa dalam menumbuhkan minat baca masyarakat tidak main-main Pustaka Desa Wukirsari saat ini memiliki koleksi buku lebih dari 5000 eksemplar koleksi buku tercetak yang dimiliki oleh Pustaka Desa.

Total Jumlah kunjungan Tahun 2018 adalah 3768 orang. dengan wilayah tersebar di wukirsari khususnya desa sekitar pustaka desa. Rata-rata setiap hari menerima kunjungan ± 41 orang/hari. Dari data jumlah koleksi buku, jumlah pengunjung yang datang, dan jumlah peminjaman setiap bulannya terlihat Pustaka Desa selalu memberikan hasil laporan administrasi kepada Pemerintah dan publik, hal ini bertujuan agar Pemerintah juga selalu melakukan evaluasi dari kurangnya Pustaka Desa. selain itu, masyarakat Desa Wukirsari juga sadar tentang manfaat adanya perpustakaan desa dan perpustakaan Desa Wukirsari tidak hanya di akses oleh masyarakat Desa Wukirsari saja tetapi masyarakat sekitar juga dapat menggunakannya.

Selain partisipasi aktif masyarakatnya, menyangkut tentang pandangan masyarakat soal bentuk transparansi pemerintah Desa Wukirsari dalam segala kebijakan Program desa terutama perpustakaan ini menurut pendapat lain dari Nutria Wijyantio sebagai berikut:

“transparansi sebetulnya sudah ada, dari pemerintah juga sangat dengan adanya perpustakaan itu benar-benar diakui dan menjadi salah satu kebanggaan dari pemerintah desa, keuntungan yang didapat dengan adanya perpustakaan ini budaya masyarakat desa wukirsari semakin tinggi.”

Di setiap pembangunan desa nilai sebuah keunggulan pasti selalu memiliki celah dan kekurangan disetiap programnya, sejauh

mana keunggulan yang dimiliki oleh Perpustakaan Desa juga memiliki persoalan ataupun hambatan. Pustaka Desa Wukirsari berlomba melawan arus globalisasi sangat tidak mudah buku melawan alat komunikasi yang tentunya lebih mudah, masyarakat juga semakin jauh dari membaca. Kelemahan di Perpustakaan Desa saat ini terletak pada sumber daya manusianya sendiri, yang kedua tenaga perpustakaan dan koordinasi antar struktur perpustakaan yang harus dievaluasi oleh Pemerintah Desa.

D. KESIMPULAN

Dari paparan yang telah diuraikan di atas tentang Peran Pemerintah Desa dalam mendukung Perpustakaan Desa untuk meningkatkan literasi terutama minat baca masyarakat di Desa Wukirsari Imogiri Kabupaten Bantul, dapat dikatakan langkah-langkah yang dilakukan Pemerintah sudah berjalan dengan cukup baik, hanya saja ada beberapa variabel dari indikator-indikator yang belum cukup terpenuhi secara efektif.

Maka dari itu dapat ditarik kesimpulan dalam penelitian ini sebagaimana yang sudah dijelaskan dalam pembahasan yaitu:

1. Peran Sebagai Suatu Kebijakan. Pemerintah sebagai aktor pelaksana kebijakan walaupun belum ada perdes khusus yang bersifat komprehensif dalam mengatur tentang pengelolaan dan pengembangan Pustaka Desa Wukirsari tetapi Pemerintah Desa Wukirsari telah membentuk peraturan tertulis tersebut dalam Surat Keputusan Lurah Nomor 11-12 Tahun 2013 dan diperkuat oleh Surat Keputusan Bupati Kabupaten Bantul Nomor 223 tentang Pendirian Perpustakaan Desa Wukirsari. Melalui SK tersebut pengelola Pustaka Desa Wukirsari berhasil menciptakan rangkaian kegiatan pemberdayaan masyarakat salah satu produk unggulan tersebut adalah MOU (*Memorandum of Understanding*) kegiatan ini bentuk kerjasama antara pihak Pustaka Desa Wukirsari dan mitra jejaring/*stake holders* dan menciptakan pojok-pojok baca di setiap Dusun dimana tempat-tempat untuk pojok

baca tersebut memiliki kegiatan edukasi yang lain, seperti Kalen Edukasi Lupatmo, Kalen Edukasi Tansah Bejo, dan Mbahe Kopi.

2. Peran Sebagai Strategi. Pemerintah Desa Wukirsari dalam pengembangan dan pengelolaan Perpustakaan Desa Wukirsari memiliki 3 strategi yaitu Tatanan regulasi dengan otoritas yang jelas, pengarahan strategi produk-produk kegiatan Pustaka Desa, dan implementasi kegiatan yang berbasis pemberdayaan masyarakat. Pengaruh indikator kredibilitas dalam mengambil keputusan disimpulkan bahwa tokoh pengambilan keputusan ada tiga peran pokok yang berjalan yaitu Pemerintah Desa, BPD dan Ketua Pengurus Pustaka Desa. Ketiga peran tersebut mempunyai kebijakan dan kewenangan masing-masing dalam kredibilitas peran tersebut untuk mengatur dan mengembangkan Perpustakaan Desa namun tetap pada satu tujuan yaitu Perencanaan yang matang dan pelibatan penyusunan program pembangunan dalam pengelolaan Perpustakaan Desa agar masyarakat tetap memanfaatkan fasilitas Pustaka Desa dengan baik.
3. Peran sebagai alat komunikasi. Pemerintah Desa berusaha mewujudkan komunikasi yang baik melalui transparansi yang jelas, Pengembangan dan pengelolaan Pustaka Desa Wukirsari memiliki dana yang bersumber dari APBDDesa dan melalui BPD laporan APBDDes dapat diakses oleh seluruh masyarakat Desa Wukirsari. Dalam variabel ini ditemukan pengaruh indikator yang kurang optimal dimana komunikasi dan koordinasi Pemerintah Desa dalam penyerapan aspirasi serta koordinasi yang kurang antara Pemerintah Desa dan Karang Taruna, maka dari itu Pemerintah Desa Wukirsari mempunyai program bernama *Public-Hearing* yang di tujukan kepada warga desanya dalam menyampaikan keluhan atau konsultasi tentang permasalahan yang berkaitan dengan Desa. Sedangkan pengaruh indikator kedua yang belum kuat dan optimal terdapat dalam pelayanan masyarakat, Pemerintah selalu mensosialisasikan kepada masyarakat agar Perpustakaan ini harus selalu dapat dimanfaatkan oleh

masyarakat, Tetapi terdapat kekurangan di dalam pengembangan dan pengelolaannya yaitu kelemahan Perputakaan Desa saat ini terletak pada sumber daya manusianya sendiri selain itu tenaga perpustakaan dan koordinasi antar struktur perpustakaan kurang berjalan dengan optimal maka dari itu harus di evaluasi oleh Pemerintah Desa.

4. SARAN

Setelah melihat berdasarkan hasil kesimpulan diatas, maka penulis menyampaikan beberapa saran yaitu sebagai berikut:

1. Pemerintah Desa Wukirsari meningkatkan kompetensi dan kualitas sumber daya sebagai peran dari aparaturnya Pemerintah Desa dan menjalin kerjasama dengan *stake holders* yang dapat membantu mengembangkan Perpustakaan Desa dan pojok-pojok baca di setiap dusun di Desa Wukirsari Imogiri agar lebih baik lagi.
2. Melakukan penyerapan aspirasi masyarakat melalui forum kemasyarakatan dan penguatan program *public-hearing* guna menjalin komunikasi dan koordinasi yang saling membantu demi tercapainya Rencana Program Kerja Pemerintah Desa sesuai dengan tujuan.
3. Penguatan struktur kepengurusan lebih ditingkatkan agar peran sesama pengurus terjalin sesuai kewenangan dan tupoksi masing-masing.
4. Bagi masyarakat sudah selayaknya berpartisipasi aktif dalam dalam segala kegiatan positif yang dilaksanakan termasuk dalam pengembangan Perpustakaan Desa dan menyadari manfaat jasa adanya Perpustakaan desa dan pojok-pojok baca di setiap dusun.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Irawan, Nata. (2017). *Tata Kelola Pemerintahan Desa Era UU Desa*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Soetomo. (2009). *Pembangunan Masyarakat*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Sugiyono. (2011). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Syafiie, Inu Kencana. (2014). *Ilmu Pemerintahan*. Jakarta: Bumi Aksara

Jurnal

- Deliany, Susy, Sri Sulistyawati, and Bambang Kurniawan. "Pembentukan Karakter Melalui Literasi dari Aspek Satra dan Budaya di Desa Manik Maraja Kec Sarimatondang Kabupaten Sidamanik." *Universitas Muslim Nusantara Alwasliyah*, 2018: hlm. 356-360.
- Gunena, Nofrison. "Peran Lurah Dalam Pembangunan Infrastruktur Di Kelurahan Kolongan Kecamatan Tahuna Barat Kabupaten Sangihe." *Governance*, 2013: Vol. 5, No. 1.
- Hayati, Nurul, and Yoyon Suryono. "EVALUASI KEBERHASILAN PROGRAM TAMAN BACAAN MASYARAKAT DALAM MENINGKATKAN MINAT BACA MASYARAKAT DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA ." *Jurnal Pendidikan dan Pemberdayaan Masyarakat* , 2015: Volume 2 – Nomor 2, November 2015, (175 - 191).
- Indriyani, Isti, Tri Joko Raharjo, and Ilyas. "Pengelolaan Taman Bacaan Masyarakat dalam Kemajuan Literasi pada Pondok Maos Guyub Kendal ." *Journal of Nonformal Education* , 2017: JNE 3 (2) (2017): 132-139 .
- Kasiyun, Suharmono. "Upaya Meningkatkan Minat Baca Sebagai Sarana Untuk Mencerdaskan Bangsa." *Jurnal Pena Indonesia*, 2015: Vol.1, No.1 hlm. 79-95.
- Permatasari, Ane. "Membangun Kualitas Bangsa Dengan Budaya Literasi." *Prosiding Seminar Nasional Bulan Bahasa UNIB 2015* , 2015: 146-156 .
- Putri, Regina Ferani, and Nurizzati. "PEMANFAATAN LENTERA NAGARI SEBAGAI TAMAN BACA BAGI ANAK DI TAPAN PESISIR SELATAN." *Jurnal Ilmu Informasi Perpustakaan dan Kearsipan*, 2018: Vol. 7, No. 1, September 2018, Seri A.

- Rahman, Fiqi Barizul, and Malta Nelisa. "PROGRAM KREATIF DI TAMAN BACAAN MASYARAKAT KOMUNITAS TOGOK DI KELURAHAN GANTING KOTA PADANG PANJANG." *Jurnal Ilmu Informasi Perpustakaan dan Kearsipan*, 2018: Vol. 7, No. 1, September 2018, Seri D.
- Retno, Sitaresmi Suryani, Yuli Rohmiyati, and Jazimatul Husna. "Pemberdayaan Masyarakat melalui Perpustakaan: Studi Kasus di Rumah Pintar "Sasana Ngudi Kawruh" Kelurahan Bandarhajo-Semarang." *Jurnal Ilmu Perpustakaan*, 2015: Vol. 4, No. 2 (2015).
- Rohman, Asep Saeful, and Sukaesih. "TRANSFORMASI PERPUSTAKAAN DESA UNTUK PEMBERDAYAAN MASYARAKAT: STUDI KASUS DI DESA MARGAMUKTI - PANGALENGAN BANDUNG." *Jurnal Perpustakaan Pertanian* , 2017: Vol. 26 No. 2 Desember 2017: 47-54.
- Saputro, Anjar Siswo. "IMPLEMENTASI KEBIJAKAN GERAKAN LITERASI SEKOLAH DI SMA NEGERI 2 BANTUL." 2018: hlm. 82-93.
- Yanto, Andri, Saleha Rodiah, and Elnovani Lusiana. "Model Aktivitas Gerakan Literasi Berbasis Komunitas Di Sudut Baca Soreang." *Jurnal Kajian Informasi & Perpustakaan*, 2016: Vol.2/No.1, hlm 107-118.

SKRIPSI

- Risanti, Fajrina. (2018). *Collaborative Governance Dalam Pengembangan Desa Wisata Wukirsari Di Kecamatan Imogiri Kabupaten Bantul*. Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta
- Setyaningrum, Annisa. (2018). *Peran Kepala Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Tahun 2015*. Yogyakarta: Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
- Shoffiyah, Lina. (2017). *Peran Perpustakaan Desa Widodomartani Terhadap Pendidikan Non Formal Masyarakat Desa Widodomartani Kecamatan Ngemplak Kabupaten Sleman*. Yogyakarta: Universitas UIN Sunan Kalijaga
- Utami, Septi. (2012). *Peranan Taman Bacaan Masyarakat (TBM) Luru Ilmu Sebagai Sumber Belajar Masyarakat di Bantul Yogyakarta*. Yogyakarta: Universitas UIN Sunan Kalijaga
- Utari, Dias Rindang. (2018). *Peran Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman Dalam Pelaksanaan Program Gerakan Literasi Sekolah Tahun 2017*. Yogyakarta: Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 Tentang Perpustakaan

Kepmendagri dan Otonomi Daerah Nomor 3 Tahun 2001

Website & Dokumen Resmi

Kemendikbud. (2016). Gerakan Literasi untuk Tumbuhkan Budaya Literasi.
Jendela Pendidikan Dan Kebudayaan, 04-21.

Profil Desa Wukirsari Di akses dari

<http://wukirsari.bantulkab.go.id/index.php/first> tanggal 29 Januari 2019 jam 16.00 WIB

PUSTAKA DESA WUKIRSARI. 2012. Di akses dari

http://wukirsari.bantulkab.go.id/assets/files/dokumen/Profile_PUSTAKA_DESA_WUKIRSARI.pdf tanggal 29 Januari 2019 jam 16.10 WIB

RPJMN 2015-2019

RPJMDes Wukirsari 2016-2022

TIM GLN Kemendikbud. (2017). Panduan gerakan literasi nasional. Di akses dari

<http://gln.kemdikbud.go.id/glnsite/wp-content/uploads/2017/08/panduan-gln.pdf> tanggal 29 Januari 2019 jam 10.00 WIB